

**ANALISIS YURIDIS DAN *MASLAHAH MURSALAH* TERHADAP  
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PONOROGO NOMOR  
310/Pdt.P/2023/PA.Po DAN PUTUSAN NOMOR 240/Pdt.P/2023/PA.Po  
TENTANG DISPENSASI KAWIN**

**SKRIPSI**

**Oleh**  
**Muhammad Hafizh Arsyadany**  
**NIM. 05040120118**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**  
**Fakultas Syariah dan Hukum**  
**Jurusan Hukum Perdata Islam**  
**Prodi Hukum Keluarga Islam**  
**Surabaya**  
**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hafizh Arsyadany  
NIM : 05040120108  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
Judul : ANALISIS YURIDIS DAN MASLAHAH  
MURSALAH TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA PONOROGO  
NOMOR 310/Pdt.P/2023/PA.Po DAN  
PUTUSAN NOMOR 240/Pdt.P/2023/PA.Po  
TENTANG DISPENSASI KAWIN

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Maret 2024

Saya yang menyatakan,

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'REPUBLIK INDONESIA', and 'METARAI TEMPEL'. The serial number '5951BALX045756423' is visible at the bottom of the stamp.

**Muhammad Hafizh Arsyadany**

NIM. 05040120118

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

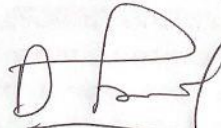
### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Hafizh Arsyadany  
NIM. : 05040120118  
Judul : ANALISIS YURIDIS DAN MASLAHAH  
MURSALAH TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA PONOROGO NOMOR  
310/Pdt.P/2023/PA.Po DAN PUTUSAN NOMOR  
240/Pdt.P/2023/PA.Po TENTANG DISPENSASI  
KAWIN

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 08 Maret 2024  
Pembimbing,



Dr. H. DARMAWAN, M.H.  
NIP. 1978004102005011004

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Hafizh Arsyadany

NIM. : 05040120118

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Darmawan, M.H.  
NIP. 198004102005011004  
Penguji III

Penguji II

Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA.  
NIP. 197001182002121001  
Penguji IV

Muhammad Jazil Rifqi, M.H.  
NIP. 198506242019031005

Zainatul Ilmiyah, M.H.  
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 24 Juni 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dean,

Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Hafizh Arsyadany  
NIM : 05040120118  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : [05040120118@student.uinsby.ac.id](mailto:05040120118@student.uinsby.ac.id)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain ( ..... )  
yang berjudul :

Analisis Yuridis dan *Maslahah Mursalah* Terhadap putusan Pengadilan Ponorogo nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po dan Putusan nomor 240/Pdt.P/2023/PA.Po Tentang Dispensasi Kawin

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 September 2024

Penulis

Muhammad Hafizh Arsyadany

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis dan masalah mursalah Terhadap Putusan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po dan Putusan Nomor 240/Pdt.P/2020/PA.Sor Tentang Dispensasi Kawin” dengan rumusan masalah : 1.Apa *Ratio decidendi* majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Ponorogo nomor 310/pdt,p/2023/PA.Po. dan Nomor 240/pdt.p/2023/PA.Po 2.Bagaimana analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Ponorogo nomor 310/pdt.p/2023/PA.Po. dan Nomor 240/pdt.p/2023/PA.Po 3.Bagaimana *masalah mursalah* terhadap Putusan Pengadilan Agama Ponorogo nomor 310/pdt.p/2023/PA.Po. dan Nomor 240/pdt.p/2023/PA.Po. Didalam Penelitian ini ada dua putusan dispensasi Kawin alasan mengajukanya sama dan hasil Putusanya berbeda yang satu diterima dan yang satunya ditolak.

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian Hukum Normatif atau penelitian pustaka dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait, Sumber bahan Hukum ada dua primier dan skunder, primier: putusan hakim nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po dan putusan 240/Pdt.P/2023/PA.Po. Skunder: sumber data yang mendukung sumber data primier seperti UU 16 Tahun 2019, Perma no 5, buku jurnal, artikel *Masalah Musrsalah*. Dokumen-dokumen ini kemudian disusun, diolah, dan dianalisis menggunakan metode "Deskriptif Analisis" untuk mengumpulkan data sesuai dengan fakta yang ada. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi.

Hakim dalam mewujudkan nilai kemanfaatan mengutamakan prinsip " menolak hal-hal yang merusak lebih baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat. Dalam menetapkan putusan dispensasi kawin nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po, Hakim mempertimbangkan berbagai sumber hukum seperti undang-undang no 16 tahun 2019, PERMA no 5 tahun 2019, dan masalah musrsalah. Dalam putusan nomor 240/Pdt.P/2023/PA.Po, Hakim menolak dispensasi karena anak pemohon belum menyelesaikan pendidikan SMA, yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang tentang kewajiban anak untuk menyelesaikan pendidikan selama 12 tahun. Meskipun permohonan dispensasi kawin memiliki alasan yang sama, terdapat perbedaan hasil antara putusan nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po yang mengabulkan dan nomor 240/Pdt.P/2023/PA.Po yang menolak. Hakim diharapkan mempertimbangkan prinsip-prinsip yuridis dalam membuat keputusan tersebut. Dalam konteks permohonan dispensasi kawin, hakim mengevaluasi apakah memberikan dispensasi tersebut akan menghasilkan manfaat atau kesejahteraan yang umum. Putusan nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po mengizinkan dispensasi dengan mempertimbangkan kebaikan anak, sedangkan putusan nomor 240/Pdt.P/2023/PA.Po menolaknya karena hakim berpendapat anak masih dapat mengalami perkembangan lebih lanjut dengan menunda pernikahan.



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERANSI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>13</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	13
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	21
C. Rumusan Masalah .....	23
D. Tujuan Penelitian .....	23
E. Manfaat Penelitian .....	24
F. Penelitian terdahulu.....	25
G. Definisi Operasional.....	30
H. Metode Penelitian.....	31
I. Sistematika Pembahasan .....	34
<b>BAB II PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN</b> .....	<b>36</b>
A. Pengertian Perkawinan.....	36
B. Syarat-Syarat Perkawinan .....	38
C. Yurisprudensi .....	42
D. UU No 16 Tahun 2019 dan PERMA No 5 Tahun 2019 .....	45
E. Dispensasi Kawin.....	49
F. <i>Maslahah Mursalah</i> .....	53
<b>BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PONOROGO NO 310/Pdt.p/2023/PA.Po DAN 240/Pdt.p/2023/PA.Po</b> .....	<b>57</b>
1. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo .....	57
2. Putusan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po dan Putusan Nomor 240/Pdt.P/2023/PA.po .....	60

3. Pertimbangan Hukum.....	63
4. Amar Putusan Pengadilan Agama Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po dan Putusan Nomor 240/Pdt.P/2023/PA.Po tentang Dispensasi Kawin .....	66
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PUTUSAN NOMOR 310/Pdt.P/2023/PA.Po DAN NOMOR 240/Pdt.P/2023/PA.Po. TENTANG DISPENSASI KAWIN .....</b>	<b>67</b>
A. Analisis pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po dan 240/Pdt.P/2023/PA.Po .....	67
B. Analisis Yuridis Dalam Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomer 310/Pdt.P/2023/PA.Po 240/Pdt.P/2023/PA.Po.....	78
C. <i>Maslahah Mursalah</i> Putusan nomer 310/pdt.p/2023/PA.Po dan <i>Maslahah Mursalah</i> Putusan nomer 240/pdt.p/2023/PA.Po .....	92
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
A. kesimpulan .....	100
B. Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>104</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR PUSTAKA

- “310\_Pdt.P\_2023\_PA.Po-DK-Anak-Perempuan-\_1-Pemohon\_-Belum-Hamil.pdf,”  
t.t.
- “Akibat yang Terjadi dari Pernikahan Dini,” t.t.
- Anggara, Sahya. *“Hukum Administrasi Negara”*. 2018,
- Anis Suryaningsih. *“Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia,”* t.t.
- dany nur madinah. *“Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Pasca Perubahan Undang-undang Perkawinan,”* t.t.
- Eka Gifriana, H.B.Syafuri, dan H. E. Zaenal Mutaqin. *“Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg).” Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 3 (2022): 199–216. <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i3.1284>.
- Farah Nabilla Masyha Putril. *“Analisis putusan perkara dispensasi nikah sesudah pemberlakuan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugil kelas IB,”* t.t.
- Hj. Andi Herawati. *“Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Alghazali.” UIN Alauddin Dpk Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makassar*, 2021.
- Kemensesneg, RI. “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.” *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48.
- Kementrian Sekretariat Negara RI. “Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6.
- Kompilasi Hukum Islam*. Vol. Buku I Hukum Perkawinan, T.T.
- KUHP dan KUHP. *No Title*. Disunting oleh Soenarto Soerodibroto. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Vol. 1, 2011.
- Maulia, Tyssa Yanuari Archida, dan Rosalia Indriyati Saptatiningsih. *“Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” Jurnal Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2020): 10–16. <https://doi.org/10.31316/jk.v4i1.877>.
- Muzammil, Iffah. *“Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam).” Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.
- “Peran Kemenag Dalam Pencegahan Perkawinan Anak.” KEMENAG, t.t.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (2019).

- Perkawinan, Legalitas, Anak Di, Bawah Umur, dan Dalam Islam. "Istinbâth," no. February (2020).
- Siti Maryam, dan Qurotul Aini. "Al-mashlahah al-mursalah," t.t., 66–79.
- Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Pertama. Perumahan FE No. 4, Jl. Utama Rokoh Banda Aceh: Turats, 2017.
- Paulus Effendie Lotulung "Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum," T.T. "putusan\_240\_pdt.p\_2023\_pa.po\_20231103153634.pdf," t.t.
- Rahma Hayu Pangastuti. "Analisis Masalah Terhadap Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020." *Etheses.Iainponorogo.*, T.T.
- Rahma Hayu Pangelstu. "Analisis masalah terhadap Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2020," t.t.
- Rahmawati. "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Putusan Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Prespektif Masalah (Studi di Pengadilan Agama Kelndarti)," t.t.
- Rifqi, Muhammad Jazil. "Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Arena Hukum* 15, no. 2 (2022): 285–306. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.4>.
- Rinrin Warisni, Rinrin Warisni. "Pembaruan Hukum Islam melalui Yurisprudensi Peradilan Agama," t.t.
- Samsudin, Akhmad. "Yurisprodensi hukum keluarga". 1 ed., t.t.
- Syariah, Fakultas, Jurusan Hukum, Progam Studi, dan Hukum Keluarga. "Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ( Studi Pengadilan Agama Banyuwangi ) Skripsi Implementasi Hukum Keluarga Tentang Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ( Studi Pengadilan Agama Banyuwangi )" 2019 (2022).
- Tampi, Butje. "Kejahatan Kesusuilaan dan Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Indonesia" 2010, 1–26.
- "Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pdf.pdf," t.t.
- Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana (2007).
- Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).
- UU No. 29, 2004. "Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia." *Demographic Research*, 2004, 4–7.
- "UU Nomor 16 Tahun 2019.pdf," t.t.
- Wahidmurni, "Dampak Perkawinan Anak Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga".
- "www.hukumonline.com," 2009, 1–27.
- Yusuf Alailhils Salam. "Analisis Yuridis Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember," t.t.